

WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 273 / 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

a. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan

b. Bab IV : Penutup.



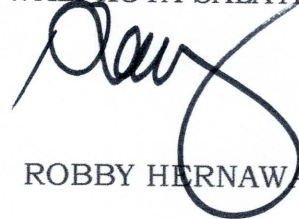
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
 - cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
 - dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
 - ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.



- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2026

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.





Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran XII

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



DINAS SOSIAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja PD sebagai persiapan penyusunan Renja PD. Penyusunan rancangan awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan.

Dinas Sosial Kota Salatiga dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk merealisasikan tugas tersebut diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi uraian secara rinci mengenai berbagai kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Penyusunan rencana kerja diarahkan untuk mencapai Misi Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yaitu “Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai” yang ditandai dengan terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi local yang berorientasi

pada ekonomi kerakyatan dan terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai. Program dan Kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja Dinas Sosial Kota Salatiga merupakan acuan kerja Pembangunan yang ingin dicapai pada Tahun 2027.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2043;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan renja ini adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis Dinas Sosial tahun 2025-2029.
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2027 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Pada tahun 2025 Renja Dinas Sosial terdapat 6 Program, 13 kegiatan dan 36 subkegiatan. Dengan Total Anggaran Penetapan Dinas Sosial Kota Salatiga sebesar: Rp. 9.167.873.802 dan berkurang pada anggaran perubahan menjadi sebesar Rp. 8.818.915.495dengan serapan Anggaran capaian fisik 93%. Tiap-tiap indikator program dapat tercapai dengan baik berbanding target capaian program, Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Program Indikator Program	Target	Realisasi
IKD Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	97.03	97.89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90.49
Program Pemberdayaan Sosial - Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas - Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment - Persentase PSKS yang dibina	80 50 81.77	100 100 100
Program Rehabilitasi Sosial - Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti - Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti - Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti - Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar	100 100 100 100	100 100 100 100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	95	97.69

Program Indikator Program	Target	Realisasi
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100
Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	100

Keberhasilan pencapaian target-target tersebut diatas ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terdapat intervensi pendanaan baik provinsi maupun pusat, serta penggunaan dana BTT Pemerintah Kota Salatiga
2. Dukungan SDM dalam pencapaian Indikator Program, termasuk dukungan dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
3. Secara Periodik dilaksanakan *updating* data

Secara garis besar, indikator baik sub kegiatan, kegiatan maupun program tercapai melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Penetapan target di tahun 2025 sesuai dengan penetapan target renstra tahun 2023-2026 dan telah disesuaikan berdasarkan hasil monev capaian indikator. Secara rinci Evaluasi Pelaksanaan Renja 2025 dan Capaian Renstra PD Tahun 2025 tersaji pada tabel 2.1 / T.C.29 (terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan OPD merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program/ kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan suatu program/ kegiatan, serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target program/ kegiatan apakah sudah sesuai dengan luaran yang diharapkan.

Dinas Sosial Kota Salatiga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial memiliki sasaran kerja utama yaitu jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang di bantu dan ditangani. Dengan didukung oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dalam melaksanakan pelayanan pada PPKS, Dinas sosial memiliki 6 Program Utama yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Setiap program tersebut di atas, terdapat indikator-indikator yang mendukung pencapaian masing-masing program.

Selain itu Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah yang menangani 1 dari 6 Urusan Pelayanan Dasar, memiliki tanggung jawab dalam penerapan penyelenggaraan urusan sosial yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Arah kebijakan daerah terkait komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial telah tertuang dalam KUA Tahun Anggaran berjalan. SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 sd Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel 2.2 / T.C.30 (terlampir)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No 13 Tahun 2014, urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi tugas dari Dinas Sosial, diidentifikasi beberapa permasalahan pokok sebagai berikut

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Peran potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal	Kurangnya Peran Serta PSKS Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	- Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Bagi PSKS Belum Optimal - Kurangnya Kemitraan dengan Dunia Usaha
Kompeksitas penanganan penyandang disabilitas anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial di luar panti sosial yang mendapatkan pelayanan sosial	Belum optimalnya peran pekerja sosial dalam penanganan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial di luar panti sosial yang mendapat-kan pelayanan sosial	Kurangnya kompetensi pekerja sosial dalam penanganan penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, tuna sosial di luar panti sosial yang mendapatkan pelayanan sosial
Belum adanya regulasi yang mengatur sistem pendataan fakir miskin	Belum ada parameter pengukuran tingkat fakir miskin	Belum adanya parameter miskin kawasan perkotaan
	Belum Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Belum Tercukupinya Pemenuhan Logistik Bencana
Belum optimalnya rehabilitasi fisik TMP	Belum optimalnya rehabilitasi fisik TMP terkendala aspek status kepemilikan tanah	Belum adanya kerjasama pemeliharaan dan pengembangan TMP antara Pemkot Salatiga dengan pemilik lahan

Isu strategis adalah masalah, tantangan, atau peluang penting yang memiliki dampak besar terhadap arah, kebijakan, atau keberhasilan suatu organisasi, lembaga, atau negara dalam jangka menengah hingga panjang.

Dalam merumuskan isu strategis Dinas Sosial 2027, terlebih dahulu dengan mengidentifikasi isu strategis pembangunan regional yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perangkat daerah.

a. Telaah Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 2025-2029 yaitu: “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden:

“Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2025-2029, dilaksanakan melalui 8 (delapan) Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional. Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial, Kementerian Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke-4 dan ke-6 sebagai berikut:

Misi nomor 4 :

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Misi nomor 6:

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

b. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yang sesuai dengan urusan pemerintahan bidang sosial adalah sebagai berikut:

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan 4) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program dan kegiatan utama harus di desain secara sinergi dan terintegrasi dengan satu data base yang akurat, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Prinsip utama dan strategi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa

penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga sangat dipengaruhi kualitas perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya.

c. Isu Strategis RPJPD Kota Salatiga 2025-2045

Berdasarkan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045, isu pembangunan daerah 20 tahun ke depan yang sesuai dengan urusan pemerintahan bidang sosial adalah: Kesejahteraan yang Adil dan Merata

Kesejahteraan sering menjadi fokus kebijakan sosial dan pembangunan di seluruh dunia. Kesejahteraan memiliki beberapa cakupan aspek, yakni aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kekayaan materi, tetapi juga tentang kualitas hidup dan kebahagiaan. Dalam rangka peningkatan pemerataan kesejahteraan, maka terdapat beberapa isu yang masih perlu ditangani di Kota Salatiga, yakni berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan Masyarakat.

d. Isu Strategis RPJMD 2025-2029 Kota Salatiga

Isu strategis Kota Salatiga yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yang sesuai dengan urusan sosial adalah: Kemiskinan dan kesenjangan

Isu kemiskinan masih menjadi persoalan yang harus ditangani lima tahun ke depan. Angka kemiskinan di Kota Salatiga relatif kecil, namun semakin kecil angka kemiskinan maka semakin besar tantangan penurunannya. Tingginya tingkat kesenjangan pendapatan penduduk menjadi persoalan utama kemiskinan di Kota Salatiga. Untuk itu, perlu pendekatan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai kelembagaan yang ada di Kota Salatiga, tidak hanya bertumpu pada perangkat daerah. Paling utama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan penyediaan data kemiskinan yang update secara berkala. Validasi terhadap data kemiskinan masih sering menjadi persoalan mendasar untuk menjamin ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Penentuan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Salatiga didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial pada tingkat Pemerintah Provinsi. Berdasarkan telaah analisa permasalahan, isu- isu penting Dinas Sosial Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Peralihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data sasaran berkaitan dengan perangkat kesejahteraan (desil) yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;

2. Minimnya pendanaaan APBD sehingga memerlukan dukungan jejaring mitra dan lembaga sebagai kerangka pendanaan alternatif pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum terpenuhinya standar kompetensi PSM/Relawan Sosial yang memiliki sertifikat SDM Kesejahteraan Sosial;
4. Belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai penanganan orang terlantar.

Untuk mendukung isu-isu tersebut diatas dalam rangka Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistik serta Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial perlu melakukan beberapa langkah strategis berikut:

1. Updating data Fakir miskin melalui Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota untuk Masyarakat
2. Upaya pemenuhan standar kompetensi PSM/Relawan Sosial yang memiliki sertifikat SDM Kesejahteraan Sosial melalui Bimtek PSKS

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mendorong Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif

2.4 Review terhadap RKPD

Review terhadap RKPD 2027 dan keterikatannya pada renja 2027 dapat disampaikan hal-hal berikut:

1. Dibuat sebuah rumusan dalam perhitungan kebutuhan pada renja 2027, sehingga anggaran dan indikator yang akan dilaksanakan lebih akurat
2. Pembuatan rumusan perhitungan disusun atas dasar kebutuhan riil pada Dinas Sosial, sesuai dengan Data PPKS dan PSKS terbaru, serta menyesuaikan pada standar harga 2026
3. Secara garis besar, keseluruhan sub kegiatan yang dirumuskan pada Renstra 2026-2029 telah memuat subkegiatan yang dibutuhkan pada Renja 2027

Review terhadap RKPD disajikan pada tabel 2.3 / T.C.31 (terlampir)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil reviu terhadap Rancangan Renstra 2026–2029, terdapat satu subkegiatan yang memerlukan kajian lebih lanjut. Subkegiatan tersebut adalah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota pada Program Pemberdayaan Sosial. Merujuk pada nomenklatur tersebut, objek pembinaan yang tercantum adalah PSKS Keluarga. Namun, kebutuhan riil di lapangan menunjukkan bahwa

objek yang mendesak untuk ditangani adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), utamanya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Penanganan ini diberikan dalam bentuk pelatihan kerja yang sangat dibutuhkan oleh PRSE sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Selain pertimbangan tersebut, subkegiatan ini bernilai sangat strategis untuk dilaksanakan karena selaras dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial.

Setelah proses reviu Renstra serta identifikasi permasalahan dan keterkaitannya dilakukan, langkah berikutnya adalah mengolah kebutuhan program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat. Secara umum, kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2027 telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas, serta kebutuhan PPKS dan PSKS secara khusus. Selain itu, perencanaan tersebut juga telah mencakup kebutuhan rutin untuk pelaksanaan operasional pada Dinas Sosial.

Proses penjaringan usulan masyarakat ini diperoleh melalui pelaksanaan tugas harian Dinas Sosial yang bersentuhan langsung dengan warga. Aparatur dinas menangkap keluhan dan aspirasi mengenai kebutuhan riil di lapangan, untuk kemudian diselaraskan dengan perencanaan Dinas Sosial yang tertuang dalam Renstra 2026–2029.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Renja 2027 disajikan pada tabel 2.4/T.C.32

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 2025-2029 yaitu: “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2025-2029, dilaksanakan melalui 8 (delapan) Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional. Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial, Kementerian Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke-4 dan ke-6 sebagai berikut:

1. Misi nomor 4:
- Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2. Misi nomor 6:
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional tersaji dari tabel berikut:

Tabel 3.1
Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program	Aktivitas
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan reformasi sistem perlindungan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan PSKS dalam rangka penanggulangan kemiskinan
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi PPKS sebagai upaya peningkatan kualitas hidup PPKS

No	Prioritas Nasional	Program	Aktivitas
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi PPKS dan updating data PPKS (utamanya kemiskinan)

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yang sesuai dengan urusan pemerintahan bidang sosial adalah sebagai berikut:

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan 4) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program dan kegiatan utama harus di desain secara sinergi dan terintegrasi dengan satu data base yang akurat, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Prinsip utama dan strategi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga sangat dipengaruhi kualitas perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya

Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Provinsi tersaji dari tabel berikut:

Tabel 3.2
Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Provinsi

No	Prioritas Provinsi	Program	Aktivitas
1	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan PSKS dalam rangka penanggulangan kemiskinan

No	Prioritas Provinsi	Program	Aktivitas
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi PPKS sebagai upaya peningkatan kualitas hidup PPKS
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi PPKS dan updating data PPKS (utamanya kemiskinan)

3.3 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Dokumen RPJMD Kota Salatiga tahun 2025 – 2029 dan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 – 2029, tujuan Dinas Sosial adalah ***Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.***

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Adapun Sasaran Dinas Sosial adalah ***Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif***

Sedangkan Strategi dalam mewujudkan tujuan dan Saaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan dan Perluasan Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS Perluasan jaminan perlindungan sosial bagi PPKS, dan korban bencana
2. Penguatan dan Pemberdayaan PSKS dalam Penanganan PPKS
3. Pemantapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang sosial

Keterkaitan antara tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
<u>NSPK:</u> Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567)	Meningkatnya pelayanan sosial yang memenuhi standar pelayanan minimal untuk hidup sehat, mandiri, dan produktif	Meningkatkan Pelayanan Minimal Bidang Sosial	Penguatan dan Perluasan Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaa n Sosial bagi PPKS	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan bagi PPKS, meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Penguatan jaminan pemenuhan satandar pelayanan bagi PPKS kewenangan kota
<u>Sasaran RPJMD:</u> Meningkatnya pelayanan sosial		Meningkatkan Pemberday	Perluasan jaminan perlindungan sosial bagi		Pemberdayaan ekonomi bagi PPKS potensial untuk	Meningkatkan akses terhadap layanan

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif ekonomi		aan Sosial Masyarakat	PPKS, korban bencana dan penguatan kelembagaan PSKS		mendapatkan life skills dan meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial.	kesejahteraan sosial bagi PPKS

Tujuan dan sasaran pada rencana kerja 2027 dituangkan dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
 Tujuan dan Sasaran Renja

No	Indikator	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
1	Meningkatnya pelayanan sosial yang memenuhi standar pelayanan minimal untuk hidup sehat, mandiri, dan produktif	1. Meningkatkan pelayanan minimal bidang sosial 2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat	Cakupan Penanganan PPKS	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PPKS terdata}} \times 100\%$	%	47.61	65.47	95.23

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial disajikan pada tabel 3.4 berikut

Tabel 3.4
 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial

No	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030	Ket
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti}}{\text{Jumlah keseluruhan Gelandangan dan Pengemis}} \times 100\%$	%	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	$\frac{\text{Jumlah Korban bencana kab – kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab – kota}}{\text{Jumlah keseluruhan korban bencana kab – kota}} \times 100\%$	%	100	100	100	

Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas dan Kota, dapat disampaikan seperti tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5

Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas dan Kota

No	Prioritas Kota	Program	Aktivitas
1	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan PSKS dalam rangka penanggulangan kemiskinan
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi PPKS sebagai upaya peningkatan kualitas hidup PPKS
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi PPKS dan updating data PPKS (utamanya kemiskinan)

3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Merujuk pada kebutuhan organisasi serta pemutakhiran program, kegiatan dan sub kegiatan maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Sosial

Berdasarkan pada Analisa kebutuhan dan pagu yang telah ditetapkan, Pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2027 ini, Dinas Sosial Kota Salatiga mengusulkan Pada Tahun 2027 direncanakan akan dilaksanakan 6 Program, 12 kegiatan dan 32 subkegiatan dengan total pagu diperkirakan sebesar Rp. 6.450.894.634 (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), dengan sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi Renstra 2025-2029 Kota Salatiga “**Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, keterampilan dan Kesehatan**”, adalah sebagai berikut:

Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

Sementara Sasaran atas tujuan di atas adalah:

Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah:

- 1) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Indikator Program: Persentase PSKS yang dibina

- 1.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.1.2 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
 - 1.1.3 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
- 2) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Indikator Program: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

 - 2.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 2.1.1 Penyediaan Permakanan
 - 2.1.2 Penyediaan Alat Bantu
 - 2.1.3 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 2.1.4 Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 2.2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - 2.2.1 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
- 3) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Indikator Program: Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial

 - 3.5 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.5.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.5.2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 4) PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Indikator Program: Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota

 - 4.1 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- 4.1.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
- 5) PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Indikator Program: Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan
 - 5.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 5.1.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 6) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Program: Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah
 - 6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 6.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 6.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 6.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 6.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 6.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 6.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 6.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 6.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 6.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 6.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6.6.3 Pemeliharaan Mebel
- 6.6.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6.6.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6.6.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada tingkat nasional, terdapat berbagai program yang mendukung peran dan fungsi Kementerian Sosial dalam mewujudkan visi dan misi Presiden, khususnya di bidang sosial. Visi Kementerian Sosial untuk periode 2025–2029 adalah: “Kementerian Sosial yang andal, profesional, inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Upaya pencapaian visi tersebut diimplementasikan melalui 8 (delapan) Asta Cita yang menjadi misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional. Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial, program-program yang telah disusun tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan hak-hak dasar, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Rincian program yang mendukung program prioritas nasional sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program Prioritas Dinas Sosial Kota Salatiga
yang mendukung Program Prioritas Nasional

No	Misi	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Alat Bantu

No	Misi	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
2	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota

Untuk mendukung keselarasan penyusunan Program pada Renja 2027 Dinas Sosial dengan RPJMD 2025-2029, disusun program prioritas yang mengacu pada RPJMD 2025-2029 sebagai berikut

No	Misi	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, disusun Program Unggulan Wali Kota yang tercantum di dalam RPJMD. Program unggulan tersebut didukung oleh program perangkat daerah sesuai dengan nomenklatnya. Terdapat enam program yang merupakan program prioritas yang mendukung visi dan misi tersebut.

Terdapat empat program yang merupakan program pendukung program unggulan Wali Kota, yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana yang selaras dengan arah kebijakan Penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan bagi PPKS, meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Rincian program yang mendukung Program Unggulan Wali Kota seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
 Program Prioritas Dinas Sosial Kota Salatiga
 yang mendukung Program Unggulan Wali Kota

No	Arah Kebijakan RPJMD	Program Unggulan Wali Kota	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	Penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan bagi PPKS	PROGRAM SEHATI (Salatiga Sehat Terlindungi)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
2	Pemberdayaan ekonomi bagi PPKS potensial untuk mendapatkan life skills dan meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial	PROGRAM SIAKAS (Salatiga akuntabel, kolaboratif, adaptif, dan sigap)	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
3		PROGRAM BIRULAH (Bangun rumah layak huni)	Program Penanganan Bencana		
4		PROGRAM SEKAR (Salatiga Berkarta)	Program Pemberdayaan Sosial		

Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas dan Kota disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.3

Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas dan Kota

No	Prioritas Kota	Program	Aktivitas
1	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan PSKS dalam rangka penanggulangan kemiskinan
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi PPKS sebagai upaya peningkatan kualitas hidup PPKS
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi PPKS dan updating data PPKS (utamanya kemiskinan)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja 2027 Dinas Sosial Kota Salatiga merencanakan 6 Program, 12 kegiatan dan 32 subkegiatan dengan total pagu diperkirakan sebesar Rp. 6.450.894.634 (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Salatiga lebih lengkap terdapat dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

No	RKPD Tahun 2027				
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Salatiga	Persentase PSKS yang dibina	46	80.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkembang Kapasitasnya	-	80.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Warakawuri/Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25.000
	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Kota Salatiga	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	185	37.225
	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kota Salatiga			17.775
2	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Salatiga	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100.000
			Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	
			Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	
			Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Salatiga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	85.000

No	RKPD Tahun 2027				
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Permakanan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	84	45.000,00
	Penyediaan Alat Bantu	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	6	10.000,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Salatiga	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	12	15.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	50	15.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Salatiga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	15.000
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12	15.000
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Salatiga	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96,0	771.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96,0	771.000
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota yang di data	60000	41000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Salatiga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	64.156	730.000
4	Program Penanganan Bencana	Kota Salatiga	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	20.300
			Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial	100	20.300
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	16	20.300
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kota Salatiga	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	30.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Pemeliharaan taman makam pahlawan	1	30.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	30.000

No	RKPD Tahun 2027				
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,5	5.440.593
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	5.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	5.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga			4.648.379
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	4.284.279
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	373.100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Salatiga		12	50.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	50.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	185.560
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	21.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	50.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	10.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	1.560
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	4.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	90.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	353.700
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	61.200
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	290.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga		12	197.954
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	100.000

No	RKPD Tahun 2027				
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
					(ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	18.000
	Pemeliharaan Mebel	Kota Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	3.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	25.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	39.954
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	116	12.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2027 berfungsi sebagai Pedoman, Penentu Arah, Sasaran dan Tujuan bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Renja Dinsos ini diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial Kota salatiga serta penguatan peran *stakeholders* untuk menentukan keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Tahunan.

Selain dari pada itu, dengan disusunnya Renja Dinsos ini sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, harapannya ke depan kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga akan lebih baik.

Namun demikian, materi yang terkandung dalam dokumen ini pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variabel atau penyebab yang dirasa tidak mampu direalisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial pada kawasan perkotaan dengan karakteristik sub urban di Kota Salatiga memiliki muatan kompleksitas baik pada aspek kemiskinan, keterlantaran, marjinalisasi, diskriminasi dan eksploitasi. Upaya kesejahteraan sosial yang berbasis pada perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial merupakan pondasi dasar untuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, urusan sosial sebagai urusan konkuren yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pemenuhan hak dasar bagi setiap warga masyarakat.

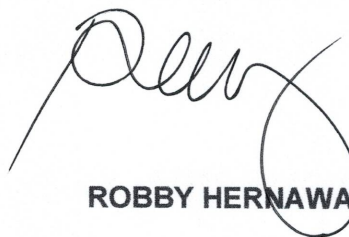
Tantangan terkini berupa transformasi pendataan sasaran layanan kesejahteraan sosial yang semula Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan integrasi Pensasaran Kemiskinan Ekstrem (PKE)-BKKBN, Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek)-BPS, dan DTKS-Kementerian Sosial, pada perkembangannya berpotensi memunculkan ketidaksinkronan antara pemeringkatan kesejahteraan (desil) dengan kondisi riil di lapangan. Proses normalisasi ditempuh melalui pendataan berbasis partisipasi kelembagaan masyarakat ditingkat RT/RW/kelurahan demi menjaga nilai objektivitas dan keadilan sosial.

Kerangka pendanaan dengan fiskal terbatas ditengah tuntutan efisiensi pada semua sektor mendorong Dinas Sosial untuk semakin mengembangkan jejaring kemitraan dan kerja sama strategis baik antar lembaga, komunitas, kelompok bahkan perorangan semata demi mendapatkan pendanaan alternatif dalam pemenuhan layanan sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama respon kasus yang bersifat kedaruratan (kontijensi) baik dikarenakan faktor keterantaran, kesakitan maupun kebencanaan.

Sinergitas antara Dinas Sosial dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan pada aspek kualitas melalui peningkatan kompetensi berupa sertifikasi SDM kesejahteraan sosial. Dengan demikian diharapkan ke depan layanan sosial dasar dan lanjutan yang diselenggarakan bagi PPKS dapat memenuhi jaminan mutu sesuai indikator SPM.

Pada aspek regulasi, proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan tertib tuna sosial diharapkan menjadi lanskap dan legalitas pada tataran operasionalisasi penanganan sosial secara komprehensif dan tuntas (terminasi). Melalui basis regulasi yang mantap diharapkan terbangun sistem, sumberdaya personel, sarana prasarana, kerangka pendanaan, dan budaya hukum masyarakat yang memadai bagi terwujudnya Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tabel 2.1 / T.C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 Kota Salatiga
Dinas Sosial Kota Salatiga

Kode					Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
									Tahun 2025				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)			
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1					Urusan Sosial									
1	06				Urusan Bidang Sosial									
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas		89,36	80	100	125,00	81,77	81,77	100,00
						Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment		37,04	81,77	100	122,29	50	50	100,00
						Persentase PSKS yang dibina		93,02	80	100	125,00	80	80	100,00
						Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100					46	46	100,00
1	06	02		2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkembang Kapasitasnya	357		351	351	100,00			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	226	205		208		226	226	100,00
					Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab/Kota	4	4		4		4	4	100,00
					Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	100	100		25		90	90	100,00
					Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	26	26		26		28	28	100,00
					Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan SDM dan LK3 kewenangan kabupaten/kota	1					0	0	
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode					Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
									Tahun 2025				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)			
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
					Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00
					Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00
					Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00
				Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	330	1310	800	800	100,00	800	800	800	100,00
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	10	16	36	30	83,33	36	36	36	100,00
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	240	25	40	40	100,00	40	40	40	100,00
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	270	180	150	114	76,00	200	200	200	100,00
1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100		100	100	100,00	100	100	100	100,00
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	50								
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40	34	34	19	55,88	34	34	34	100,00
1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	98,50	96,81	95	97,69	102,83	100	100	100	100,00
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	98,50	96,81	95	97,69	102,83	95	95	95	100,00
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerahn kab/kota yang di data	97.000	81000	61.361	72.146	117,58	61360	61360	61360	100,00
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.675	12428	13.482	14.681	108,89	13482	13482	13482	100,00

Kode				Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
								Tahun 2025				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	06		Program Penanganan Bencana	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
					Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	81	95	134	141,05	84	84	100,00
1	06	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan taman makam pahlawan	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,71	90,47	90	90,49	100,54	90,47	90,47	100,00
					Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,50	73,00	70,75	76,3	107,84	70,9	78,2	110,30
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	5	6	6	100,00	6	6	100,00
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	5	6	6	100,00	6	6	100,00
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12	12	100,00	12	12	100,00
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	46	33	36	33	91,67	33	33	100,00
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	12	12	9	75,00	12	12	100,00
1	06	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	12	12	12	100,00	12	12	100,00
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	6	7	2	28,57	8	8	100,00

Kode				Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
								Tahun 2025				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30							
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	12	12	100,00	12	12	100,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2	1	1	1	100,00	1	1	100,00
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7	2	2	2	100,00	2	2	100,00
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	15	20	18	90,00	17	17	100,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	40	40	38	95,00	55	55	100,00
1	06	01	2.07	Penyediaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau BangunanLainnya	2					12	12	100,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11	11	100,00	10	10	100,00
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel						5	5	100,00
1	06	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	100,00	12	12	100,00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	3	3	100,00	3	3	100,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	12	12	1	8,33	1	1	100,00
1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	100,00	12	12	100,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35	5	35	35	100,00	35	35	100,00

Kode				Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
								Tahun 2025				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
				Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	4	3	0	0	0,00	4	4	0,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	2	3	3	100,00	2	2	100,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	2	2	100,00	2	2	100,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116	1	10	10	100,00	116	116	100,00

TABEL 2.2 / T.C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	9	9	10	11	12	13
23	Indeks Kepuasan Masyarakat			89	89,5	90	90,5	90,5	90,5	90,47	89,91	90,49	90,49	90,49	90,49	
24	Presentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas			45,3	62,5	81,7	100	100	100	89,36	100	100	100	100	100	
25	Presentase LKS/LKSA yang mengikuti Assesment			34,61	42,3	50	57,69	57,69	57,69	37,04	100	100	100	100	100	
26	Prsentase PSKS yang dibina			70	75	80	85	85	85	93,02	98,86	100	100	100	100	
27	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kulaitasnya dalam pelayanan sosial			0	0	0	46	60	73	0	0	0	51	63,75	75,5	
28	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
29	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
30	Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
31	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
32	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi			94,5	95	95,5	96	96	96	97,69	97,61	97,69	97,69	97,69	97,69	
33	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota Yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
34	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
35	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

TABEL 2.3 / T.C. 31
Review terhadap RKPD pada Tahun 2027

No	RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(ribu)					(ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Salatiga	Persentase PSKS yang dibina	46	80.000	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Salatiga	Persentase PSKS yang dibina	46	80.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkembang Kapasitasnya	-	80.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkembang Kapasitasnya	-	80.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25.000	
	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Kota Salatiga	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	185	37.225	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Kota Salatiga	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	185	37.225	
	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kota Salatiga			17.775	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kota Salatiga			17.775	
2	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Salatiga	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100.000	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Salatiga	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100.000	

No	RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(ribu)					(ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100				Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100		
			Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100				Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100		
			Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100				Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Salatiga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	85.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Salatiga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	85.000	
	Penyediaan Permakanan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	84	45.000,00	Penyediaan Permakanan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	84	45.000,00	
	Penyediaan Alat Bantu	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	6	10.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	6	10.000,00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Salatiga	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	12	15.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Salatiga	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	12	15.000	

No	RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(ribu)					(ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	50	15.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	50	15.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Salatiga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	15.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Salatiga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	15.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12	15.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12	15.000	
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Salatiga	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96,0	771.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Salatiga	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96,0	771.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96,0	771.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96,0	771.000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerahn kab/kota yang di data	60000	41000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerahn kab/kota yang di data	60000	41000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Salatiga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	64.156	730.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Salatiga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	64.156	730.000	
4	Program Penanganan Bencana	Kota Salatiga	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	20.300	Program Penanganan Bencana	Kota Salatiga	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	20.300	

No	RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(ribu)					(ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100				Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100		
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial	100	20.300	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial	100	20.300	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	16	20.300	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	16	20.300	
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kota Salatiga	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	30.000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kota Salatiga	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	30.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Pemeliharaan taman makam pahlawan	1	30.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Pemeliharaan taman makam pahlawan	1	30.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	30.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	30.000	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,5	5.449.593	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,5	5.449.593	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	5.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	5.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	5.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	5.000	

No	RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(ribu)					(ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga			4.657.379	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga			4.657.379	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	4.284.279	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	4.284.279	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	373.100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	373.100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Salatiga		12	50.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Salatiga		12	50.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	50.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	50.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	185.560	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	185.560	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	21.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	21.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	50.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	50.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	10.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	10.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	1.560	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	1.560	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	4.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	4.000	

No	RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(ribu)					(ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	90.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	90.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	353.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	353.700	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	61.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	61.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	290.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	290.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga		12	197.954	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga		12	197.954	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	100.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	18.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	18.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	3.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	3.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	25.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	25.000	

No	RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(ribu)					(ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	39.954	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	39.954	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	116	12.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	116	12.000	

TABEL 2.4 / T.C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kota Salatiga

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	Program Pemberdayaan Sosial				
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Keluarga	
2	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Kota Salatiga	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	185 Orang	
3	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kota Salatiga	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	50 Keluarga	
	Program Rehabilitasi Sosial				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Salatiga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
4	Penyediaan Permakanan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	84 Orang	
5	Penyediaan Alat Bantu	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	6 Orang	
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Salatiga	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	12 Orang	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
7	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	50 Orang	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Salatiga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
8	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12 Dokumen	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
9	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota yang di data	60000 FM	
10	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Salatiga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	64156 KPM	
	Program Penanganan Bencana				
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Salatiga			
11	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Dinas Sosial						6.450.894.634,00								0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.450.894.634,00								0,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.450.894.634,00								0,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.449.594.634,00								0,00	
			-	-		-	-	5.399.594.634,00							-	0,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00						-		0,00	
		-						5.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.000.000,00							-	0,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	5.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.657.379.885,00						-		0,00	
		-						4.657.379.885,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	373.100.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.284.279.885,00							-	0,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.284.279.885,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	33 Orang/bulan	4.284.279.885,00	Kota Salatiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						373.100.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	373.100.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						50.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	8 Dokumen	50.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						185.560.000,00						-		0,00	
		-						185.560.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.560.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	4.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	90.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	21.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						21.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	21.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	50.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.560.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	1.560.000,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	15 Laporan	4.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	60 Laporan	90.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						353.700.000,00						-		0,00	
		-						353.700.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	61.200.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	290.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.500.000,00							-	0,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						61.200.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	61.200.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						290.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	290.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						197.954.749,00						-		0,00	
		-						197.954.749,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	39.954.749,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	18.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	3.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	25.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	12.000.000,00							-	0,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	5 Unit	100.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	35 Unit	18.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						3.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	1 Unit	3.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	25.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						39.954.749,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	39.954.749,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	12.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						80.000.000,00								0,00	
			-	-		-	-	80.000.000,00							-	0,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00						-		0,00	
		-						80.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	25.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-		-	-	17.775.000,00							-	0,00	
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	-		-	-	37.225.000,00							-	0,00	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						25.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	25 Keluarga	25.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan						37.225.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	-		-	185 Orang	37.225.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial						17.775.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-		-	0 Orang	17.775.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						100.000.000,00								0,00	
			-	-		-	-	70.000.000,00							-	0,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						85.000.000,00						-		0,00	
		-						85.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	15.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	45.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	15.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						45.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	84 Orang	45.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						10.000.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	6 Orang	10.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						15.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	12 Orang	15.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						15.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	15.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						15.000.000,00						-		0,00	
		-						15.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-		-	-	15.000.000,00							-	0,00	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						15.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-		-	12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						771.000.000,00								0,00	
			-	-		-	-	771.000.000,00							-	0,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						771.000.000,00						-		0,00	
		-						771.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-		-	-	41.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	730.000.000,00							-	0,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						41.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-		-	60000 Orang	41.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						730.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	64.156 Orang	730.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					-	0,00	Dinas Sosial
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						20.300.000,00								0,00	
			-	-		-	-	20.300.000,00							-	0,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	16 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						0,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						20.300.000,00						-		0,00	
		-						20.300.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	20.300.000,00							-	0,00	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						20.300.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	16 Orang	20.300.000,00	Kota Salatiga	-					-	0,00	Dinas Sosial
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						30.000.000,00								0,00	
			-	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						30.000.000,00						-		0,00	
		-						30.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						30.000.000,00			-	-	j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS;			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		-	1 Makam	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kota Salatiga Kecamatan Tingkir Kelurahan Kutowinangun Kidul 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	J U M L A H							6.450.894.634,00								0,00	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA
TAHUN 2027

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan Renja Dinas
Sosial dengan hasil sebagai berikut:

- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada
pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
paling sedikit memuat:
1. Pendahuluan;
 2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 5. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2027
berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan
Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada
formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen
rancangan akhir Renja Tahun 2027 kepada Kepala BAPPEDA Kota
Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Kepala Dinas Sosial

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Kabid Perenc. Kesra BAPPEDA
Kota Salatiga

dr. RIANI ISYANA PRAMASANTHI, M.Kes
NIP. 197602042005012012

AZIZ MUSLIM, SE, MM
NIP. 197402172005011005

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja
Dinas Sosial
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.		✓	Baru akan disahkan setelah ini	

Formulir E.71
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Dinas Sosial Kota Salatiga

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sudah mengacu pada Renstra PD Tahun 2025 – 2029
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Perumusan rencana program dan kegiatan yang mendukung prioritas kota, provinsi dan nasional sudah ada. (sudah diakomodir di bab 3.3)

Formulir Verifikasi Sistematika Renja PD Tahun 2027

Dinas Sosial Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2026 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja PD	✓		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	✓		
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD	✓		
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD	✓		
II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 & Capaian Renstra PD Tahun 2024	Tabel evaluasi Renja Tahun 2024 Tabel T-C. 29	✓		
II.2	Analisa Kinerja Pelayanan	IKU, SPM, IKK, Uraian Indikator yang belum memenuhi target Tabel T-C. 30	✓		
II.3	Permasalahan dan Isu Strategis PD	1. Sejauh mana Tingkat kinerja PD dan hal kritis terkait pelayanan; 2. Permasalahan dan hambatan yg dihadapi; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi KaDa, tuj dan sasaran Pemda dan program prioritas; 4. Tantangan dan peluang; 5. Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan dalam perumusan	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		program dan kegiatan prioritas tahun n.			
		Isu strategis sesuai dengan menyimpulkan dari: a. Permasalahan b. Indikator yang belum dicapai	✓		
II.4	Review terhadap RKPD	Tabel review RKPD dan Analisis Kebutuhan Tabel T-C. 31	✓		
II.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Tabel T-C.32	✓		
III.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.	✓		
III.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2026	Tujuan dan sasaran mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029	✓		
III.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029 Berisikan Penjelasan mengenai: 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		rumusan program dan kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; 4. Melampirkan rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan tabel T-C.33			
IV.1	Rencana Kerja dan Pendanaan	beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif (cetak renja dari SIPD RI)	✓		
V	Penutup	Bab ini memuat diantaranya 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3. Rencana tindak lanjut.	✓		



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs <http://salatigakota.go.id>
Surat Elektronik: setda@salatigakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA

NOMOR : 900/1163

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA

TAHUN 2027

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja tahun 2027 perlu dibentuk Tim Penyusun rencana kerja perangkat daerah di Dinas Sosial Kota Salatiga;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pembentukan tim penyusun rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 7);
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2027.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1Desember 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA,



RIANI ISYANA PRAMASANTHI

Tembusan :

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
5. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA
NOMOR : 900/1163
TANGGAL : 1 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KOTASALATIGA TAHUN 2027

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Sosial Kota Salatiga	Ketua
3	Ahli Muda Perencana pada Dinas Sosial Kota Salatiga	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Salatiga	Anggota
5	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Salatiga	Anggota
6	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Salatiga	Anggota
7	Staf Sekretariat pada Dinas Sosial Kota Salatiga	Sekretariat Tim

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA,



RIANI ISYANA PRAMASANTHI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA
NOMOR : 900/
TANGGAL : 10 Desember 2025

URAIAN TUGAS PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA TAHUN
2027

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan, masukan, dan saran berkaitan dengan penyusunan RENJA Tahun 2027, baik dalam hal persiapan, mekanisme, penyelenggaraan, pelaksanaan, penyusunan, hasil akhir dokumen, maupun legalisasi;
 - b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengawasi, dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun RENJA Tahun 2027.
2. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan Tim Penyusun RENJA Tahun 2027;
 - b. Membantu Pengarah dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim;
 - c. Memimpin proses penyusunan RENJA Tahun 2027 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025–2029;
 - d. Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan RENJA Tahun 2027 kepada Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga.
3. Sekretaris
 - a. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan Tim Penyusun RENJA Tahun 2027;
 - b. Mengelola administrasi, surat-menyurat, serta dokumentasi kegiatan penyusunan RENJA Tahun 2027;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan bahan rapat, notulen, dan laporan hasil rapat Tim;
 - d. Menghimpun dan menyusun bahan dari anggota tim untuk dirangkum menjadi dokumen RENJA Tahun 2027;
 - e. Membantu Ketua dalam menyiapkan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan RENJA Tahun 2027;
 - f. Mengarsipkan dokumen dan memastikan kelengkapan administrasi untuk legalisasi RENJA Tahun 2027.
4. Anggota
 - a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2027;
 - b. Melakukan analisis kinerja pelayanan OPD Dinas Sosial;

- c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Dinas Sosial;
 - d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD 2027 dan RENJA 2027;
 - e. Merumuskan tujuan, sasaran, serta program/kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025–2029;
 - f. Merumuskan kegiatan prioritas Tahun 2027.
5. Sekretariat Tim
- a. Menyediakan dukungan administratif, teknis, dan operasional bagi kelancaran kerja Tim Penyusun RENJA Tahun 2027;
 - b. Menyiapkan undangan, kelengkapan rapat, dan koordinasi logistik penyusunan RENJA Tahun 2027;
 - c. Membantu Sekretaris Tim dalam pengumpulan data, penyusunan bahan, dan dokumentasi;
 - d. Mengelola absensi, daftar hadir, serta rekapitulasi kehadiran anggota tim dalam setiap kegiatan;
 - e. Menyusun laporan administratif kegiatan rapat/tahapan penyusunan RENJA Tahun 2027;
 - f. Menjadi penghubung antara Tim Penyusun dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial terkait kebutuhan data dan informasi.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA,



RIANI ISYANA PRAMASANTHI



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs <http://salatigakota.go.id>
Surat Elektronik: setda@salatigakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA NOMOR 900/1162

TENTANG AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA TAHUN 2027

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterpaduan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2027, perlu disusun Agenda Kerja Tim Penyusun Renja;
bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah harus mengikuti ketentuan tahapan dan jadwal perencanaan tahunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 7);
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Agenda Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2027.
- KEDUA : Agenda Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Agenda Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman pelaksanaan tahapan penyusunan Renja Tahun 2027 di lingkungan Dinas Sosial Kota Salatiga.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Renja melaksanakan seluruh tahapan penyusunan Renja Tahun 2027 sesuai jadwal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, serta bertanggung jawab atas ketepatan substansi, ketepatan waktu, dan kesesuaian dokumen Renja dengan RKPD dan ketentuan perencanaan daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Desember 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA,



RIANI ISYANA PRAMASANTHI

Tembusan :

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
5. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA
NOMOR : 900/1162
TANGGAL : 1 Desember 2025

AGENDA KERJA TIMPENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA TAHUN 2027

No	Tahapan	Permendagri	Rencana Waktu	Keterangan
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Sosial	Minggu pertama Desember	M1 Desember 2025	Dinsos mulai menyusun Rancangan Awal Renja 2027 berdasarkan Renstra 2025–2029.
2	Pengisian & Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD (entry data RKPD melalui SIPD)	Minggu pertama Maret	M1 Maret 2026	Penyempurnaan Rancangan Awal berdasarkan arah kebijakan RKPD 2027.
3	Penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial (versi 2)	Minggu ketiga Maret	M1 Maret 2026	Rancangan Renja disesuaikan hasil Forum Perangkat Daerah/Forum Konsultasi Publik.
4	Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial	1 minggu setelah RKPD ditetapkan	M2 Juni 2026	Penyelarasan Renja dengan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.
5	Verifikasi oleh Bappeda	2 minggu setelah Rancangan Akhir Renja disusun	M4 Juni 2026	Bappeda mengecek konsistensi Renja: Renstra–RPJMD–RKPD.
6	Reviu oleh Inspektorat	1 setelah Rancangan Akhir Renja disusun	M1 Juli 2026	Reviu internal pengendalian mutu dokumen Renja.
7	Penetapan Renja Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2027	1 bulan setelah RKPD ditetapkan	M2 Juli 2026	Penetapan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA,



RIANI ISYANA PRAMASANTH